BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (Parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga Eksekutif atau Kepala Pemerintahan seperti Presiden, Gubernur, atau Bupati/Walikota. (www.kpu.go.id/index.php)

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana demokrasi yang menjadi ajang bagi kedaulatan rakyat. Dalam negara demokratis, pemilu yang pada kenyataannya merupakan cerminan suara rakyat menjadi penentu bagi keberlangsungan sebuah negara untuk menentukan nasib dan tujuan sebuah bangsa. Suara-suara inilah yang akan diwadahi oleh partai politik-partai politik yang mengikuti pemilu menjadi wujud wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (www.kpu.go.id/index.php)

Pada tahun 2009 bangsa Indonesia mengadakan pemilihan umum untuk kesepuluh kalinya. Pelaksanaan pemilu secara periodik menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem negara demokrasi. Sejak Pemilihan Umum tahun 1999 Indonesia telah dianggap sebagai negara terbesar ketiga yang menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis. Pemilihan umum ini menjadi wahana aspirasi politik rakyat Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali, sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu juga menjadi ajang paling terstruktur, bebas,

dan adil untuk menentukan partai dan tokoh yang berhak mewakili rakyat. Dalam sistem perwakilan, tak ada cara lain yang paling absah untuk memilih para wakil rakyat kecuali melalui pemilu. (www.kpu.go.id/index.php)

Adanya banyak partai politik yang mengikuti pemilihan umum tahun 2009, sebagai konsekuensi sistem multipartai diterapkan di Indonesia. Terdapatnya banyak partai politik juga berdampak pada ketatnya kompetisi antar partai politik dalam menggaet suara pemilih untuk memperebutkan kursi di parlemen. Keberhasilan sebuah partai politik dalam perolehan suara, membuktikan betapa besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap partai politik tersebut. (www.kpu.go.id/index.php)

Reformasi menjadikan proses politik menjadi lebih berdinamika, yang diwarnai oleh pertarungan antar partai yang sangat terbuka, hingga akhirnya dibutuhkan adanya strategi politik untuk memenangkan hati dan meraih simpati konstituen sebagai penentu dari suatu keputusan politik, dengan menggunakan berbagai pendekatan termasuk di dalamnya memperhatikan isu politik yang akan dijual kepada kelompok pemilih, memperhitungkan kekuatan sendiri, dan mengamati kemampuan partai pesaing yang menjadi rival politik.

Perubahan dalam masyarakat lokal maupun global juga memberikan implikasi terhadap cara melaksanakan komunikasi politik. Dengan demikian hilangnya sistem tertutup, otoriter dan represif, semakin terbuka pula ruang – ruang kebebasan untuk berekspresi.(Firmanzah, 2007 : 98)

Maka sudah seharusnyalah setiap partai wajib memiliki strategi untuk dapat mendulang suara yang signifikan dari konstituen, dengan konsep

pemenangan yang terfokus guna memenangkan partainya, baik melalui pengorganisasian dan konsolidasi kader, menggunakan mesin kekuatan organisasi sayap yang di miliknya, penguasaan terhadap kondisi objektif yang ada dalam areal pertarungan politiknya, propaganda isu, dan sebagainya. Karena tanpa itu pegaruh dan kekuasaan mustahil diperoleh, maka pada prinsipnya kemenangan dalam Pemilu adalah harga mati bagi setiap Partai politik.

Guna memenangkan kompetisi di ajang pemilu, para kontestan partai politik saling bersaing satu sama lain dengan menerapkan berbagai strategi komunikasi politik yang jitu. Tentu, komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik menyesuaikan dengan sistem politik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik mau tidak mau turut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukan oleh partai politik. Melihat bahwa komunikasi politik merupakan salah satu masukan yang menentukan bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik. Komunikasi politik menyambungkan semua bagian dari sistem politik sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan. (Almond, 1990 : 34)

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. (www.golkar.or.id).

Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu. Pada Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini terulang kembali pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya. (www.golkar.or.id)

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya di masa pemerintahan Soeharto. (www.golkar.or.id)

Partai Golkar sebagai salah satu partai besar yang sudah mengakar kadernya dan manajemen pangelolaan partainya. Partai Golkar selalu ikut berpartisipasi guna menempatkan calonnya di kursi legislatif dan mewakili aspirasi rakyat. Partai ini menjadi pemenang pada masa orde lama dan orde baru, namun pada era reformasi sudah mengalami penurunan. Pemilu pertama pada era reformasi 1999, yang diikuti 48 partai politik dan partai Golkar menjadi posisi kedua setelah PDIP dengan perolehan suara 23.741.749 (22,4%). Kemudian pada pemilu 2004 partai Golkar berhasil menjadi pemenang pemilu dengan memperoleh suara sebanyak 24.461.104 (21,58%) dan yang terakhir pada pemilu 2009 kemarin yang diikuti 34 partai, partai Golkar berhasil memperoleh suara

nasional sebanyak 14,45% dan menjadi urutan kedua setelah Partai Demokrat. (www.partai info.com)

Menarik untuk melihat fenomena politik yang terjadi di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Rokan Hilir. Pada pemilu 2004 Golkar meraih 31.526 suara dengan memperoleh 8 (delapan) kursi di DPRD Kabupaten Rokan Hilir sedangkan pada pemilu tahun 2009 terjadi peningkatan menjadi 57.865 suara (25,76%) dengan memperoleh 12 (dua belas) kursi, sangat meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Sebagai sebuah partai yang besar sebagai pemenang pemilu sebelumnya, tentunya ini merupakan sebuah prestasi karena hasil yang diinginkan oleh partai ini memenuhi harapan yang terjadi dilapangan apalagi dewasa ini tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat untuk memilih wakil – wakil rakyat melalui partai politik hampir bisa dikatakan sudah mulai menurun. Maka dari itu untuk pemilu tahun 2009, tentu ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi Partai Golkar Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan perolehan suara dan jumlah kursi di legislatif dari pemilu – pemilu sebelumnya.

Selanjutnya, dalam tulisan ini penulis akan mengangkat bagaimana Partai Golkar, sebagai suatu identitas kepartaian berproses melakukan upaya pemenangan dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana yang menjadi studi kasus penulis.

Berdasarkan fenomena yang dikemukan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Partai Golongan Karya Kabupaten Rokan Hilir. Dari penjelasan diatas, strategi komunikasi politik berperan sangat penting dalam

pemenangan pemilihan umum, karena berhasil atau tidaknya sebuah partai politik dalam memenangkan pemilu tergantung bagaimana strategi komunikasi politik yang dilakukan, untuk itu penulis mengadakan penelitian dengan judul:

“ Strategi Komunikasi Politik Partai Golongan Karya Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemenangan Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009 “

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang di lakukan oleh Pengurus dan Calon Legislatif Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Rokan Hilir dalam pemenangan Pemilu Legislatif 2009 untuk memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
2. Judul ini menarik untuk diteliti, karena mengingat Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan partai pemenang Pemilu Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2004 dan 2009.
3. Judul yang diteliti karena berkaitan dengan jurusan yang sedang penulis jalani serta pengalaman penulis yang pernah didapatkan dilapangan sehingga penulis merasa mampu untuk melaksanakannya.

C. Penegasan Istilah

1. Strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal ini dapat ditujukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 tahun terakhir. Menurut Porter strategi adalah suatu alat yang sangat penting untuk

mencapai keunggulan bersaing (Rangkuti, 2004:4). Senada dengan itu, Hamel dan Pharalad juga mengatakan strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan. (Rangkuti, 2004:4)

2. Komunikasi

Dalam buku Komunikasi Organisasi, definisi komunikasi menurut Carl I. Hovland, Janis, dan Kelley adalah :

"*Communication is the process by which an individual transmits stimuly (usually verbal) to modify the behavior of other individuals*".

Dengan kata lain, komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada definisi ini mereka menganggap komunikasi sebagai suatu proses, bukan sebagai suatu hal.(Muhammad, 2009 : 2)

3. Komunikasi Politik

Mengenai komunikasi politik ini *(political communication)* Kantaprawira (1983:25) memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah.

4. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)

Partai Politik adalah merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang di persatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. (Surbakti, 1992 : 116)

5. Partai Golongan Karya

Partai Golongan Karya (Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu. (www.golkar.or.id)

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan

1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya. (www.golkar.or.id)

Dilandasi oleh semangat reformasi tersebut, Golkar melakukan perubahan paradigma serta menegaskan dirinya sebagai partai politik pada Rapat Pimpinan Paripurna Golongan Karya tanggal 19 Oktober 1998 dan di deklarasikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1999, dengan nama Partai Golongan Karya. Dengan perubahan tersebut, Partai Golongan Karya sepenuhnya mengemban hakikat partai politik sebagai pilar demokrasi dan kekuatan politik rakyat untuk memperjuangkan cita-cita dan aspirasinya secara mandiri, bebas, dan demokratis. (www.golkar.or.id).

Bahwa Partai Golongan Karya adalah pengemban hakikat tatanan baru, yang dijiwai semangat pembaharuan, budi pekerti luhur, akhlak mulia dan moral, serta semangat pembangunan terus menerus dalam meningkatkan karya dan kekaryaan di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mengingat semangat cita dan citra pembaharuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan, mendorong timbulnya tuntunan agar pembaharuan dilaksanakan dengan mengembangkan reformasi di segala bidang. (www.golkar.or.id)

6. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

7. Legislatif

Legislatif berasal dari kata"legislate" yang berarti lembaga yang bertugas membuat undang – undang. Anggotanya dianggap sebagai perwakilan rakyat karena itulah lembaga legislatif sering dinamakan badan atau dewan perwakilan rakyat. Nama lain yang sering dipakai juga adalah parlemen, kongres ataupun asembli nasional. Dalam sistem parlemen legislatif adalah badan tertinggi yang menunjuk eksekutif. Sedangkan dalam sistem presiden, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari eksekutif. Dinegara yang menganut system pemerintahan presidensil ini, legislatif berfungsi sebagai Penetapan Undang – Undang, yang terdiri atas MPR dan DPR.

Legislatif adalah Dewan yang berwenang membuat Undang-Undang. (Bintan Roger Saragih, 2006 : 171)

8. Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181), bahwa Kabupaten Rokan Hilir berasal dari sebagian wiIayah Kabupaten Bengkalis, yang terdiri atas wilayah : Kecamatan Kubu; Kecamatan Bangko; Kecamatan Rimba Melintang; Kecamatan Tanah Putih; dan Kecamatan Bagan Sinembah, dengan Ibu kota Kabupaten berkedudukan di Ujung Tanjung.

Bahwa dengan memperhatikan belum siapnya sarana dan prasarana, terbatasnya fasilitas pendukung, dan belum tersedianya pembiayaan yang memadai untuk pembangunan fisik ibu kota definitif Kabupaten Rokan Hilir selama 5 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan memperhatikan aspirasi masyarakat dan dukungan dari kelembagaan pemerintahan didaerah, secara formal pemindahan Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir dari Ujung Tanjung ke Bagansiapiapi telah lama dikehendaki.

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir yang semula berkedudukan di Ujung Tanjung dipindah ke Bagansiapiapi.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Bagaimana Strategi Komunikasi Politik Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2009.

b. Langkah – langkah apa yang dilakukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Rokan Hilir untuk menjalankan Strategi Komunikasi Politik dalam Pemenangan Pemilu Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009.

2. Batasan Masalah

Dari uraian didalam latar belakang sebagaimana diatas dan untuk memudahkan penelitian ini maka penulis membuat batasan masalah sehingga penelitian ini lebih terarah. Adapun batasan masalah yang di teliti adalah Bagaimana Strategi Komunikasi Politik Partai Golongan Karya Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemenangan Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009.

3. Rumusan Masalah

Bagaimana Strategi Komunikasi Politik Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemenangan Pemilu Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian secara fundamental untuk memenuhi pemecahan masalah secara ilmiah, untuk itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Strategi Pemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2009 Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Rokan Hilir, ditinjau dari aspek Komunikasi Politik.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan adalah :

2.1 Kegunaan Akademis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan ilmu komunikasi, khususnya pada kajian komunikasi politik yang berkaitan dengan strategi komunikasi politik oleh partai politik dalam menghadapi pemilihan umum.

b. Memberikan gambaran tentang Strategi Komunikasi Politik yang dijalankan Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemenangan Pemilu Tahun 2009.

c. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran secara keilmiahan dalam mengembangkan dan menambah wawasan dalam kerangka Komunikasi Politik.

2.2 Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai informasi dan bahan masukan bagi para pengurus dan kader partai politik secara umum dan khususnya Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Rokan Hilir

serta masyarakat luas dalam menentukan kebijakan dan strategi komunikasi pada pemilu-pemilu selanjutnya.

b. Dapat memberikan hasil atau manfaat dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan kualitas agar menghasilkan strategi komunikasi politik yang lebih baik sebagai Partai Politik Peserta Pemilu, khususnya Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Rokan Hilir.

c. Sebagai rujukan atau masukan bagi pihak – pihak yang berhubungan dalam hal pelaksanaan komunikasi politik secara cakrawala keilmiahan.

F. Konsep Teoritis

1. Strategi

1.1 Pengertian Strategi

Strategi adalah suatu perencanaan *(planning)* dan manajemen *(management)* untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktek operasionalnya. (Rosady Ruslan, 2007)

Politik dan strategi, adalah suatu mekanisme bagaimana seseorang ataupun kelompok dengan ide politik yang di pahaminya, mampu memenangkan suatu pertarungan politik disaat banyak orang yang berkepentingan menghendaki hal yang sama, ide politik tentu saja akan menciptakan perbedaan antar masyarakat yang menjadi pendukung ide tersebut, dan dalam setiap keadaan pasti ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan, karna hasil dari satu keputusan politik akan melahirkan perubahan ataupun kondisi yang sama disaat status quo yang memenangkan

pertarungan itu, oleh karena itu setiap idea tau pemikiran pasti memiliki pendukung dan penentang.

Dalam hal ini ide politik hanya akan dapat, atau diwujudkan dalam satu pertarungan melawan penentang ide tersebut, yang akan selalu bertumpu pada bagaimana kekuasaan dan pengaruh dapat diperoleh, tetapi yang menjadi permasalahannya tentu saja, bagaimana kekuasaan dan pengaruh itu bisa diperoleh, disaat yang sama, banyak kelompok yang menghendaki hal yang sama, maka untuk mampu meraih kemenangan tentunya dalam Pemilu, dibutuhkanlah suatu perencanaan yang hati-hati, maka disilah letak substansi dari strategi politik itu.(Peter Scholder, 2003: 6-9)

1.2 Macam – Macam Strategi

Adapun macam – macam strategi yaitu :

a. *The name of calling device*

   Strategi merupakan untuk menjatuhkan reputasi seseorang (kompetitor) melalui statement, ucapan – ucapan atau pendapat yang meremehkan.

b. *Transfer device*

   Strategi ini adalah mentransfer atau mengalihkan karakter atau kharisma dan wibawa tertentu ke pihak lain. Misalnya, seorang pengusaha memajang fotonya bersama pejabat tinggi (militer) di kantornya dengan maksud agar wibawa pejabat tersebut berpindah kepada dirinya.

c. *Testimnonial device*

Strategi ini adalah untuk mencari dukungan dari tokoh atau *public figure* yang terkenal untuk mengesankan dan memperkuat produk atau pesan yang ingin disampaikan itu melalui statement atau ucapan hingga sosok tokoh yang ditampilkan dalam iklan atau gambar dan sebagainya.

d. *Card stacking device*

Strategi ini merupakan strategi berisikan fakta yang mendukung pendapat seseorang dengan menyampingkan semua fakta yang berlawanan walaupun hal itu benar.

e. *Bandwagon device*

Strategi ini merupakan strategi tertentu untuk menarik perhatian khalayak ramai, misalnya satu kelompok lain akan mengikutnya karena terpengaruh.(Rosady Ruslan, 1997 : 85)

1.3 Unsur – Unsur Strategi

Adapun unsur – unsur yang terlibat dalam strategi secara umum adalah :

a. Unsur pelaksana strategi

Unsur pelaksana dalam hal ini anggota suatu lembaga atau organisasi yang telah ditunjuk sesuai dengan kapasitasnya sebagai anggota.

b. Penyusunan program strategi

Penyusunan program strategi dalam suatu lembaga merupakan hal yang signifikan, sehingga dengan penyusunan yang sistematis maka akan menghasilkan hasil yang signifikan namun sebaliknya.

c. Alat yang digunakan

Dalam pelaksanaan strategi ini banyak alat atau media yang dapat digunakan seperti media cetak, elektronik dan laini –lain dan hal tersebut sesuai dengan keadaan dimana strategi itu akan dilaksanakan.

1.4 Tujuan Strategi

Strategi merupakan langkah yang sangat signifikan bagi organisasi atau lembaga dalam upaya peningkatan dan pengembangan lembaga itu sendiri. Untuk itu tujuan strategi secara umum adalah untuk menghindari atau mengantisipasi segala bentuk kegagalan yang akan terjadi dengan memperhatikan kemungkinan – kemungkinan tersebut, maka membutuhkan segenap pengelolaan secara professional.

1.5 Fungsi Strategi

Adapun fungsi strategi adalah berupaya menanamkan pemahaman dan pengertian melalui proses publikasi dan memiliki bentuk lebih banyak menekankan aspek persuasif dan koersif agar public tidak berkesempatan untuk “ menoleh “ ke pihak lain atau tidak punya pilihan lain.(Rosady Ruslan,1997:84)

2. Komunikasi

2.1 Pengertian Komunikasi

Ada beberapa devinisi tentang komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

Menurut pendapat Supratiknya (1995:30) : ”Komunikasi adalah setiap bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun non verbal yang ditanggapi oleh orang lain”.

Menurut Gitosudarmo dan Sudita (1997:197) :“Komunikasi didefinisikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima baik lisan, tertulis maupun menggunakan alat komunikasi”.

Menurut Handoko (1995:272) : “Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain ”.

Menurut Pace dan Faules (2006:31) : “Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukkan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu”.

Dari definisi–definisi tentang komunikasi diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses saling berbagi dan berinteraksi dalam menggunakan suatu informasi secara bersama atau disebut juga proses penyampaian dan pertukaran berita antara dua pihak (si pengirim dan si penerima) atau lebih yang merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dan berpengaruh terhadap tindakan manajerial.

Komunikasi, sebagai suatu proses dengan mana orang-orang bermaksud memberikan pengertian-pengertian melalui pengiringan berita simbolis, dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang yang berbeda pula, sehingga sering disebut rantai pertukaran informasi. Konsep ini mempunyai unsur-unsur :

1. Suatu kegiatan untuk membuat seseorang mengerti.
2. Suatu sarana pengaliran informasi.
3. Suatu sistem bagi terjalinnya komunikasi diantara individu-individu.

Komunikasi dapat terjadi karena adanya komponen-komponen, yaitu komunikator yang mengirimkan pesan yang diekspresikan *(encoded)* melalui berbagai lambang dalam bentuk bahasa. Selanjutnya pesan disampaikan melalui perantara yaitu media komunikasi. Pesan diterima oleh penerima pesan *(recipients)* yang selanjutnya pesan tersebut ditafsirkan *(decoded).* (Umar, 2005:26).

2. 2. Fungsi Komunikasi

Menurut Robbins (1996:5) ”Komunikasi menjalankan empat fungsi utama di dalam suatu kelompok atau organisasi : kendali (kontrol, pengawasan), motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi”.

Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai hirarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh para karyawan.

Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja dengan baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar.

Komunikasi yang terjadi didalam kelompok itu merupakan mekanisme fundamental dengan mana anggota-anggota menunjukkan kekecewaan dan

rasa puas mereka. oleh karena itu, komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dari perasaaan dan pemenuhan kebutuhan sosial.

Fungsi terakhir yang dilakukan oleh komunikasi berhubungan dengan perannya dalam mempermudah pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data guna mengenali dan menilai pilihan-pilihan alternatif.

Komunikasi juga memiliki elemen-elemen yang dapat mempengaruhi proses terjadinya komunikasi, sebagaimana dalam bukunya Teri Kwal Gamble dan Michael Gamble dalam bukunya communication works, elemen-elemen komunikasi adalah:

1. People (komunikator dan komunikan). Komunikator adalah pihak (baik tunggal maupun jamak) yang mengawali proses komunikasi yaitu mengirimkan pesan, sedangkan komunikan adalah pihak (baik tunggal maupun jamak) yang menerima pesan dari komunikator.
2. Message (Pesan). Pesan dalam komunikasi ini tidak melulu harus perkataan, pesan disini dapat merupakan gerakan, suara, tulisan, simbol,dan lain-lain. Pesan dalam komunikasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal merupakan pesan berupa kata-kata, sedangkan non-verbal merupakan pesan yang isinya bukan lah kata-kata. Pesan tersebut juga dapat digolongkan kembali, yaitu vokal dan non-vokal. Pesan vokal adalah pesan yang berupa suara, sedangkan non-vokal adalah pesan yang tidak bersuara. Jadi jika lebih

diperinci pesan dalam proses komunikasi adalah: Verbal vokal, verbal non-vokal, non-verbal vokal, dan non-verbal non-vokal.

3. Channels (Media). Media dalam proses komunikasi adalah hal yang membantu tersampainya pesan dari komunikator kepada komunikan. Media disini tidak harus media massa, dapat juga hal-hal yang membantu tersampaikannya pesan untuk perorangan, tetapi memang yang paling sering digunakan merupakan media massa.
4. Noise (gangguan). Gangguan dalam proses komunikasi adalah segala hal yang memang dapat mengganggu, menghambat, maupun menggagalkan proses pengiriman pesan.
5. Context (Seting). Seting dalam proses komunikasi ini merupakan sebuah situasi lingkungan tersebut. Seting juga dapat mempengaruhi proses pengiriman pesan dari komunikator dan komunikan.
6. Feedback (balasan). Feedback dalam proses komunikasi adalah sebuah balasan yang dikirmkan oleh komunikan kepada komunikator, setelah menerima pesan dari sang komunikator. Feedback disini biasanya berbentuk langsung setelah si komunikan menerima pesan.
7. Effects (efek). Efek dalam proses komunikasi ini merupakan sebuah akibat setelah terjadinya proses komunikasi terjadi. Efek ini dapat terjadi pada komunikator, komunikan, maupun lingkungan. Efek ini dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung (memerlukan waktu). (http://edukasi.kompasiana.com/2012/12/19/pengertian-komunikasi-517196.html)

2.3 Strategi Komunikasi

Strategi pelaksanaan komunikasi agar memperhatikan beberapa hal berikut:

1. *Konsolidasi*, yaitu memantapkan dan mengembangkan ketenagaan dan kelembagaan yang tangguh yang mendukung kerja " proses komunikasi " misalnya :

   a. Mempersiapkan komunikator dan komunikasn yang memiliki kredibilitas tertentu sehingga memudahkan proses pemberian makna yang sama atas pesan organisasi.
   b. Mempersiapkan pesan dan proses pertukaran pesan yang berisi tema masalah – masalah yang dihadapi oleh organisasi maupun seluruh anggota.
   c. Mempersiapkan media atau saluran komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi komunikator dan komunikan.
   d. Mempersiapkan berbagai metode, teknik komunikasi yang memungkinkan pelaksanaan komunikasi timbal balik dengan penuh pengertian.

2. *Integrasi*, yaitu menggalang keterpaduan kerja baik intern maupun ekstern dengan lembaga atau pihak lain yang potensial untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna proses komunikasi.

3. *Implementasi*, yaitu menerapkan metode dan teknik perencanaan proses komunikasi termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta materi perencanaan.(Alo Liliweri, 1997 : 285-286)

4. Komunikasi Politik

a. Defenisi Komunikasi Politik

Menurut Dahlan (1999) ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik. Dengan demikian pengertian komunikasi dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang – lambang atau simbol – simbol komunikasi yang berisi pesan – pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Meadow dalam Nimmo (2004) juga membuat defenisi bahwa " *political communications refers to any exchange of symbols or message that to a significant extent have been shaped by or have consequences for political systems* " . Disini Meadow memberi tekanan bahwa simbol – simbol atau pesan yang disampaikan itu secara signifikan dibentuk memiliki konsekuensi terhadap sistem politik.

Dalam buku *Introduction to Political Communication* oleh McNair (2003) dinyatakan bahwa " *poltical communication as pure discussion about the allocation of public resources (revenues), official author (who is given the power to make legal, legislative and excecutive decision), and official sanctions (what the state reward or punishes).* " Jadi komunikasi politik menurut McNair murni membicarakan tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk memberi kekuasaan dan keputusan dalam

pembuatan undang – undang atau aturan, apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sanksi – sanksi, apakah itu dalam bentuk hadiah atau denda. (Hafied Cangara : 35-36)

b. Tujuan Komunikasi Politik

Tujuan komunikasi politik adalah menyampaikan pesan – pesan politik yang bersifat konstruktif terhadap komponen – komponen yang terlibat dalam pelaksanaan politik, seperti anggota masyarakat, lembaga negara, dan sebagainya. Berdasarkan wujud tersebut maka pengelolaan waktu, materi yang ada merupakan landasan dalam menyelesaikan dinamika yang terjadi. Selanjutnya keikutsertaan semua pihak dalam merekonstruksi unsur – unsur komunikasi politik seperti lembaga pemerintah, partai adalah salah satu langkah dalam mempotensikan struktur secara baik.

c. Unsur – Unsur Komunikasi Politik

Seperti halnya dengan disiplin komunikasi lainnya, komunikasi politik sebagai *body of knowledge* juga terdiri atas berbagai unsur, yakni : sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek. (Nimmo : 1978, Mansfield dan Weaver : 1982 dalam Dahlan, 1990)

1. Komunikator Politik

   Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian sumber komunikasi politik adalah mereka – mereka yang dapat memberi informasi tentang hal – hal yang mengandung makna atau bobot politik , misalnya Presiden, Menteri, Anggota DPR, MPR, KPU, Gubernur,

Bupati / Walikota, DPRD, politisi, fungsionaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan.

2. Pesan Politik

   Pesan adalah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun terang – terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya Pidato politik, undang – undang kepartaian, undang – undang pemilu, pernyataan politik, artikel atau isi buku / brosur dan berita surat kabar, radio, televis dan internet yang berisi ulasan politik dan pemerintahan, puisi politik, spanduk atau baleho, iklan politik, propaganda, perang urat syaraf *(psywar)*, dan semacamnya.

3. Saluran atau Media Politik

   Saluran atau media politik adalah alat atau sarana yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan – pesan politiknya. Misalnya :

   a. Media cetak

      Contohnya : surat kabar, tabloid, majalah dan buku

   b. Media elektronik

      Contohnya : film, radio, televisi, video, computer, internet

   c. Media format kecil

      Contohnya : leaflet, brosur, selebaran, stiker, bulletin

   d. Media luar ruang (out door media)

Contohnya: baliho, spanduk, reklame, *electronic board*, bendera, jumbai, pin, logo, topi, rompi, kaos oblong, iklan mobil, kalender, kulit buku, block note, pulpen, gantungan kunci, payung, dos jinjingan, dan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membangun citra *(image building)*

e. Saluran komunikasi kelompok

Contohnya: struktur dalam partai politik (DPP, DPW, DPD, DPC, DPAC), organisasi profesi, ikatan alumni, organisasi sosial keagamaan, karang taruna, kelompok pengajian, kelompok tani dan nelayan, koperasi, persatuan olahraga, kerukunan keluarga, perhimpunan minat semacamnya.

f. Saluran komunikasi publik

Contonhya: aula, balai desa, pameran, alun – alun, panggung kesenian, pasar, swalayan (supermarket, mall, plaza), sekolah, kampus.

g. Saluran komunikasi sosial

Contohnya : pesta perkawinan, acara sunatan, arisan, pertunjukkan wayang, pesta rakyat, rumah ronda, sumur umum, pesta tani, dan semacamnya.

4. Sasaran atau target politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara *(vote)* kepada partai atau kandidat pemilihan umum. Mereka adalah buruh, pemuda, perempuan,

ibu rumah tangga, pensiunan, veteran, pedagang kaki lima, para tukang (kayu, batu, cukur, becak), orang cacat, mahasiswa, sopir angkutan, nelayan, petani yang berhak memilih maupun pelajar dan siswa yang akan memilih setelah cukup usia.

5. Pengaruh atau efek komunikasi politik

   Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai – partai politik, dimana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara *(vote)* dalam pemilihan umum. Pemberian suara ini sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai tingkat presiden dan wakil presiden, anggota DPR, MPR, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sampai pada tingkat DPRD.(Hafied Cangara, 2009 : 37-38)

d. Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik menurut Mc Nair (2003 : 21) memiliki lima fungsi dasar, yakni sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi disekitarnya. Disini media komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan juga fungsi monitoring apa yang terjadi dalam masyarakat.
2. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikan fakta yang ada.
3. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah – masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam

membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat.

4. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga – lembaga politik

Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program – program lembaga politi dapat disalurkan kepada media massa. (Hafied Cangara, 2009 : 39-40)

e. Bentuk – Bentuk Strategi Komunikasi Politik

Adapun bentuk – bentuk strategi komunikasi politik antara lain :

1. Retorika Politik

   Retorika politik atau pidato politik sebagai suatu seni berbicara memang memiliki daya persuasive politik yang sangat tinggi, dengan menggunakan bahasa lisan yang indah (irama, mimik, dan intonasi suara)

2. Agitasi Politik

   Agitasi banyak sekali digunakan sebagai salah satu bentuk komunikasi politik. Agitasi menurut Blumer (1996) dimulai dengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat dengan menggerakkan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami selama ini (penuh ketidak pastian dan penderitaan), dengan tujuan menimbulkan kegelisahan dikalangan massa.

3. Propaganda Politik

   Ada beberapa tipe propaganda yang diperkenalkan oleh para pakar dan penulis Doob (1996) membedakan antara propaganda yang disengaja dan propaganda yang tidak disengaja.

4. Public Relations Politik

   Secara umum public relations dipahami sebagai suatu usaha penyampaian idea atau pesan kepada masyarakat. Dan di Indonesia diterjemahkan sebagai hubungan masyarakat

5. Kampanye Politik

   Kampanye Politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat.

6. Lobi Politik

   Lobi politik dan rapat politik merupakan forum pembicaraan politik yang dalam perspektif komunikasi politik tercakup dalam komunikasi antarpersonal atau tatap muka, yang bersifat dialogis.

7. Pola Tindakan Politik

   Sesungguhnya tindakan politik dalam peristiwa komunikasi politik bertujuan untuk membentuk citra (image) politik bagi khalayak (masyarakat), yaitu gambaran realitas politik yang memiliki makna.

5. Partai Politik

5.1 Pengertian Partai Politik

Maka dapat dipahami partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir secara rapi, stabil dan dipersatukan serta dimotivasi dengan ideologi tertentu, berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan kebijakan umum yang mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang di susun ini merupakan hasil pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan memanfaatkan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum. (Surbakti, 2010 : 148-149)

Budiarjo (dalam Hafied Cangara, 2009 : 209) bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terkelola anggotanya mempunyai orientasi, nilai – nilai dan cita – cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik dengan carakonstitusional untuk melaksanakan kebikjasanaan – kebijaksanaan umum.

5.2 Syarat Pembentukan Partai Politik

Pasal 2

1) Sekurang-kurangmya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat membentuk Partai Politik.

(2) Partai Politik yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. Mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai.
b. Asas atau ciri. aspirasi dan program Partai Politik tidak bertentangan dengan Pancasila;
c. Keanggotaan Partai Politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih.
d. Partai Politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan lambang negara asing, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Merah Putih. Bendera kebangsaan negara asing. Gambar perorangan dan nama serupa lambang partai lain yang telah ada.

Pasal 3

Pembentukan Partai Politik tidak boleh membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

Pasal 4

(1) Partai Politik didirikan dengan akte notaris dan didaftarkan pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
(2) Departemen Kehakiman Republik Indonesia hanya dapat menerima pendaftaran pendirian Partai Politik apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang ini.
(3) Pengesahan pendirian Partai Politik sebagai badan hukum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri

Kehakiman Republik Indonesia. (UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik)

5.3 Tujuan Partai Politik

Pasal 5

(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:

a. Mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.(UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik)

5.4 Fungsi, Hak dan Kewajiban Partai Politik

Pasal 7

(1) Partai Politik berfungsi untuk:

a. Melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

b. Menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat daIam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan/ perwakilan rakyat;

c. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan - jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

(2) Partai Politik sebagai lembaga demokrasi merupakan wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik.

Pasal 8

Partai Politik mempunyai hak:

a. Ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
b. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.

Pasal 9

Partai Politik berkewajiban:

a. Memegang teguh serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
d. Menyukseskan pembangunan nasional;
e. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis, jujur,dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan supra secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. (UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik)

5.5 Keanggotaan dan Kepengurusan Partai Politik

Pasal 10

(1) Anggota Partai Politik adalah warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;

b. Dapat membaca dan menulis;

c. Memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Partai Politik.

(2) Partai Politik mendaftar dan memelihara daftar anggotanya.

Pasal 11

Partai Politik dapat membentuk kepengurusan di: a. ibukota negara Republik Indonesia untuk Pengurus Tingkat Pusat; b. ibukota propinsi untuk Pengurus Daerah Tingkat I; c. ibukota kabupaten/kotamadya untuk Pengurus Daerah Tingkat II; d. kecamatan untuk Pengurus Tingkat Kecamatan; e. desa/kelurahan untuk Pengurus Tingkat Desa/Kelurahan. (UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik)

G. Konsep Operasional

Konsep operasional ini akan menjelaskan variabel yang akan disajikan dan sebagai tolak ukur dalam penelitian. Strategi Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Rokan Hilir dalam pemenangan pemilihan umum legislatif tahun 2014, serta langkah – langkah yang dilakukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dalam menghadapi persaingan calon legislatif partai politik lainnya.

Indikator Strategi Pemenangan Partai Golongan Karya (Golkar) yaitu:

Adapun strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Pengurus dan Calon Legislatif Partai Golongan Karya (Golkar) Dalam Pemenangan Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Rokan Hilir, diantaranya :

1. Adanya pembentukan image dan citra yang baik dimata masyarakat
2. Adanya Penyampaian Visi dan Misi serta Program partai secara jelas kepada masyarakat.
3. Adanya komunikasi yang dijalankan berlangsung dua arah secara timbal balik antara pengurus dan caleg dengan masyarakat
4. Adanya Kampanye politik
5. Adanya Penggunaan media elektronik dan media massa sebagai sarana untuk sosialisasi

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Partai Golongan Karya Kabupaten Rokan Hilir yang beralamatkan di Jl. Lintas Bagansiapiapi – Ujung Tanjung, Kawasan Batu 4 Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko – Kabupaten Rokan Hilir.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian adalah Partai Golongan Karya Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini Pengurus Harian, Dewan penasehat, Badan Pemenangan Pemilu, Calon Legislatif, dan Organisasi Sayap

b. Objek Penelitian adalah Strategi Komunikasi Politik Partai Golongan Karya Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemenangan Pemilu Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah "keseluruhan dari subjek penelitian" (Suharsimi, 1998 : 121 122). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 55 Orang. Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). (Sugiyono, 2009:62)

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 Orang yang terdiri atas :

a. Pengurus Harian Partai Golongan Karya Kabupaten Rokan Hilir yakni 3 orang.
b. Dewan Penasehat DPD Partai Golongan Karya yakni 1 Orang
c. Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golongan Karya Kabupaten Rokan Hilir yakni 1 orang.

d. Calon Legislatif DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilu Tahun 2009 yakni 4 orang.

e. Organisasi Sayap Partai Golongan Karya Kabupaten Rokan Hilir yakni 1 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.(Bungin, 2008 : 115)

b. Wawancara yaitu cara pengumpulan data melalui Tanya jawab langsung dengan personil dan untuk mendapatkan data sesuai penelitian. Wawancara di lakukan kepada Pengurus Harian, Bappilu, Pengurus Organisasi Sayap, Calon Legislatif dan Staff Sekretariat Partai Golongan Karya Kabupaten Rokan Hilir.

c. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2008 : 121).Dalam dokumentasi ini peneliti memanfaatkan arsip-arsip dan dokumen, buku – buku, majalah, koran, serta sumber bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis terhadap perumusan yang ada digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif, maka dalam menganalisa data yang berhasil dikumpulkan tidak digunakan uji statistik melainkan non statistik sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif.

Penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah dengan menganalisa data yang ada. Data kualitatif digambarkan dengan kata-kata, dan semua data yang telah dianalisa secara mendalam sehingga mendapatkan informasi yang benar-benar akurat dan terpercaya. (Deddy Mulyana,2004:112)

Dezin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. (Moleong, 2004 : 5)

G. Sistematika Penulisan

Bab I	Merupakan Bab Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Konsep Teoritis, Konsep Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
Bab II	Gambaran umum tentang lokasi penelitian terdiri dari Sejarah Partai Golkar Rokan Hilir ,Anggaran Rumah Tangga Partai, Keanggotaan Partai, serta Susunan Kelembagaan Partai Golkar Kabupaten Rokan Hilir.
Bab III	Penyajian Data
Bab IV	Analisa Data
Bab V	Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran